



LAPORAN KINERJA 2023

**BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL**

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



LAPORAN KINERJA 2023

**BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL**

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



FOCUS GROUP
DISCUSSION

Kinerja
Diploma

Indonesia

Statatan BKS
mparan Ker

KATA PENGANTAR

ENDAH TD RETNOASTUTI
KEPALA BIRO KSAP DAN OI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T., karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya tahun 2023 dapat dilalui dengan baik walaupun dengan berbagai tantangan yang dihadapi seperti peran DPR sebagai tuan rumah beberapa Sidang Internasional, kebijakan Pemerintah melalui BAPPENAS dengan melakukan realokasi dan refocusing anggaran DIPA Tahun 2023 yang memberikan efek cukup signifikan pada keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Kunjungan luar negeri Anggota DPR RI dalam rangka peran Diplomasi Parlemen. Selain itu, adanya konflik dan isu kemanusiaan di Gaza, hingga isu perubahan iklim global.

Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (Biro KSAP dan OI) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam hal ini, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro KSAP dan OI melalui Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja Tahun 2023 Biro KSAP dan OI menyajikan berbagai capaian strategis dan keberhasilan di lingkup Biro KSAP dan OI. Selain dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dan peningkatan kinerja menuju terwujudnya *Good Governance*, laporan ini sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan para pemangku kepentingan Biro KSAP dan OI.

Akhir kata, perkenankan kami untuk menerima masukan, saran dan kritik serta pandangan konstruktif yang difokuskan untuk kesempurnaan Laporan Kinerja ini, yang selanjutnya akan terus mengikuti perkembangan dinamika sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.





EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (Biro KSAP dan OI) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam hal ini, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro KSAP dan OI melalui Perjanjian Kinerja (PK) atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023, sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang, serta sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro KSAP dan OI dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Biro KSAP dan OI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Kesekretariatan Kerja Sama antar Parlemen dan Organisasi Internasional serta layanan alih bahasa. Fungsi tersebut didukung oleh 4 (empat) unit kerja setingkat eselon III dan kelompok Jabatan Fungsional.

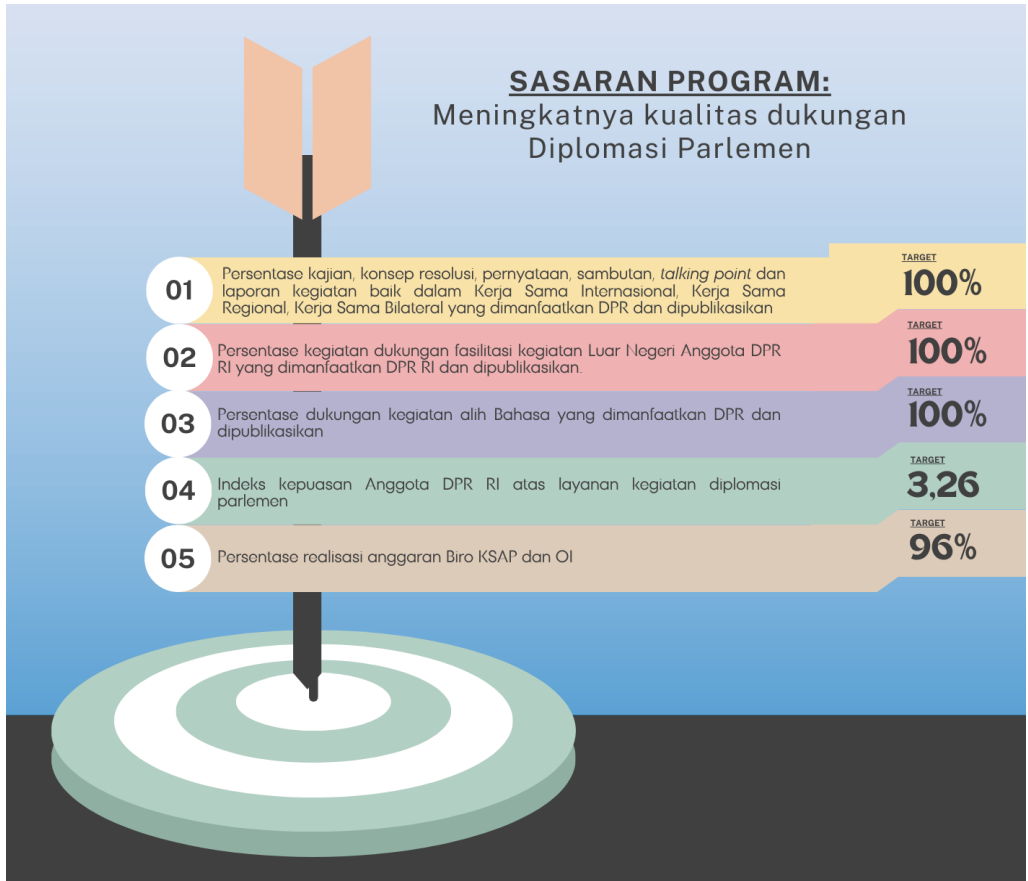


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja di tahun 2023, Biro KSAP dan OI menghadapi beberapa tantangan strategis yang berkaitan erat dengan dinamika internal dan eksternal yang terdiri atas:

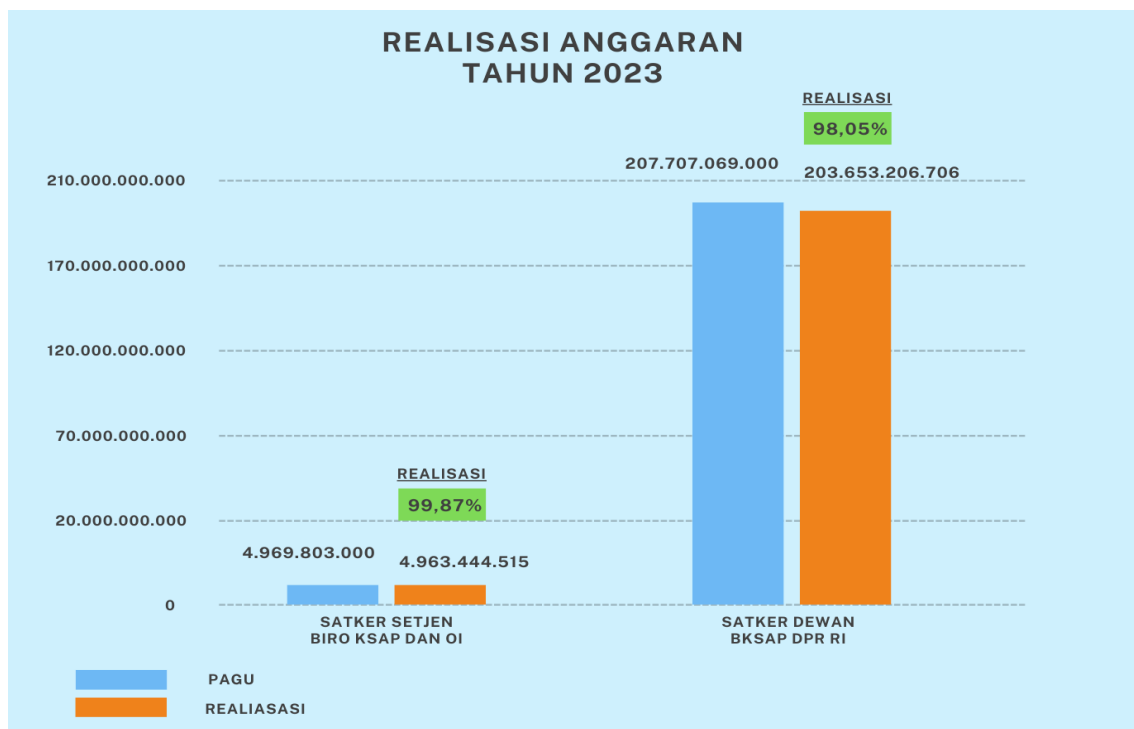
1. Pada tahun 2023 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) masih melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk DIPA tahun 2023. Kebijakan nasional ini memberikan efek yang cukup signifikan pada pelaksanaan kegiatan di Setjen DPR RI termasuk Biro KSAP dan OI.
2. Di Tahun 2023, Indonesia dalam hal ini DPR RI berkesempatan untuk menjadi tuan rumah 6 (enam) sidang internasional yaitu: *SEAPAC Conference and General Assembly* di Jakarta dan Bogor, *AIPA Leaders' Interface Meeting* di Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur (NTT), *The 6th Meeting of AIPACODD* di Bogor- Jawa Barat, *WAIPA Coordinating Meeting* (virtual) di Padang - Sumatera Barat, Sidang Umum ke 44 AIPA di Jakarta dan *The 9th MIKTA Speakers' Consultation* di Jakarta. Dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) sebagai sistem pendukung, khususnya Biro KSAP dan OI, merupakan *leading* unit dalam pelaksanaan sidang internasional tersebut. Besarnya skala kegiatan dan waktu pelaksanaan memberikan tantangan tersendiri bagi Biro KSAP dan OI. Selain itu keterbatasan anggaran DIPA Setjen DPR RI (Biro KSAP dan OI) akibat kebijakan realokasi dan refocusing anggaran secara nasional juga menambah kompleksitas penyelenggaraan enam sidang internasional tersebut.
3. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kunjungan luar negeri Anggota DPR RI dalam rangka peran diplomasi Parlemen diantisipasi melalui strategi pemilihan negara dengan indeks biaya perjalanan dinas yang lebih rendah dari yang direncanakan di DIPA dan disesuaikan dengan penerimaan dari parlemen yang dituju. Di tahun 2023 direncanakan pengiriman 5 GKSB, 3 Kunjungan Diplomasi BKSAP dan Kunjungan Perorangan Anggota untuk 115 Anggota. Realisasi kunjungan GKSB dapat dilaksanakan sebanyak 16 kali, kunjungan diplomasi BKSAP terlaksana 6 kali sementara untuk kunjungan kerja perorangan Anggota terlaksana untuk 243 anggota DPR RI.
4. Rangkaian kegiatan Presidensi AIPA yang berlangsung mulai Agustus 2022 hingga Agustus 2023 menjadi tantangan tersendiri bagi Biro KSAP dan OI pada aspek keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan Renstra Setjen DPR RI, Biro KSAP dan OI telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 yang berisi sasaran program, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun serta capaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:





Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Biro KSAP dan OI mengelola anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan tahun 2023 dengan **rincian dan realisasi sebagai berikut:**



Secara umum sasaran program/ kegiatan Biro KSAP dan OI sudah tercapai dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk selanjutnya menjadi rekomendasi untuk peningkatan kinerja Biro KSAP dan OI di masa mendatang, antara lain:

1. Dalam survey untuk meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen, perlu dilaksanakan penyelarasan antara bentuk layanan yang diberikan dengan harapan dan ekspektasi Anggota DPR RI sebagai penerima layanan. Penyelarasan ini juga perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam pelaksanaan survei kepuasan oleh Setjen DPR RI. Selain itu, dalam menetapkan target kinerja hendaknya mengedepankan metode **S.M.A.R.T.** (*Specific, Measureable, Attainable, relevant dan Time-Bond*) khususnya dalam penetapan target yang realistis dan dapat dicapai.
2. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran dengan lebih optimal dan menetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan sebagai *exit strategy* dalam menghadapi risiko pelaksanaan refocussing/ realokasi anggaran di Setjen DPR RI/ secara nasional di masa yang akan datang. Apabila akan ada penambahan anggaran, lebih baik diperoleh lebih awal agar dapat dipergunakan secara maksimal.
3. Terkait Zona Integritas dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih, Biro KSAP dan OI terus berinovasi dalam memberikan layanan kepada *stakeholder* dan terus melakukan berbagai perbaikan dalam rangka mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), akan tetapi perlu diingat bahwa untuk meraih predikat WBBM diperlukan nilai SAKIP Institusi dengan Nilai A, untuk itu diperlukan kerja sama dari semua pihak.
4. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, yang memiliki penguasaan substansi tentang isu-isu hubungan internasional baik bilateral, regional maupun internasional, serta disiplin ilmu lainnya melalui diklat/sekolah/seminar/kursus, termasuk peningkatan kompetensi para pejabat fungsional penerjemah DPR RI.
5. Perlunya pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR RI dan masyarakat, yaitu dengan *updating* database BKSAP, inovasi aplikasi berbagai sistem kerja untuk kerja yang efektif dan efisien, dan *update* pemuatan informasi kegiatan BKSAP terbaru melalui website dan sosial media DPR RI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.





BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL





I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang diatur selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Selain ke tiga fungsi tersebut, DPR RI juga memiliki fungsi lainnya yaitu diplomasi parlemen.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuklah Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) sebagai aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi dan keahlian.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (Biro KSAP dan OI) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Setjen DPR RI nomor 2 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Setjen dan BK DPR RI.

LKj Biro KSAP dan OI tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023, sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang, serta sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro KSAP dan OI dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam Persekjen ini dijabarkan susunan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI serta kedudukan, tugas dan fungsi dari Biro KSAP dan OI.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

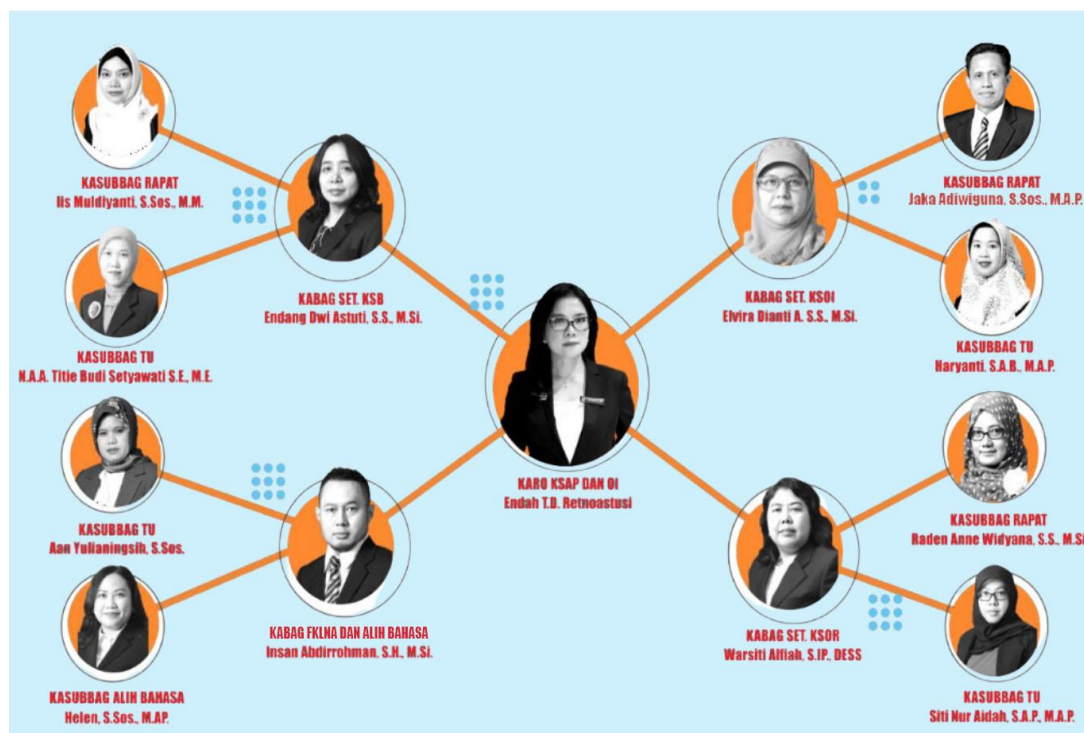
Biro KSAP dan OI merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. Tugas pokok dan fungsi Biro KSAP dan OI sebagaimana terdapat dalam **gambar 1**:



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro KSAP dan OI didukung oleh 4 (empat) unit kerja setingkat eselon III dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

1. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional;
2. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional;
3. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral;
4. Bagian Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Biro KSAP dan OI tergambar dalam **gambar 2**:



D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Beberapa permasalahan strategis yang dihadapi Biro KSAP dan OI berkaitan erat dengan dinamika internal dan eksternal yang terdiri atas:

5. Pada tahun 2023 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) masih melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk DIPA tahun 2023. Kebijakan nasional ini memberikan efek yang cukup signifikan pada pelaksanaan kegiatan di Setjen DPR RI termasuk Biro KSAP dan OI.
6. Di Tahun 2023, Indonesia dalam hal ini DPR RI berkesempatan untuk menjadi tuan rumah 6 (enam) sidang internasional yaitu: SEAPAC Conference and General Assembly di Jakarta dan Bogor, AIPA Leaders' Interface Meeting di Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur (NTT), The 6th Meeting of AIPACODD di Bogor- Jawa Barat, WAIPA Coordinating Meeting (virtual) di Padang - Sumatera Barat, Sidang Umum ke 44 AIPA di Jakarta dan The 9th MIKTA Speakers' Consultation di Jakarta. Dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) sebagai sistem

pendukung, khususnya Biro KSAP dan OI, merupakan leading unit dalam pelaksanaan sidang internasional tersebut. Besarnya skala kegiatan dan waktu pelaksanaan memberikan tantangan tersendiri bagi Biro KSAP dan OI. Selain itu keterbatasan anggaran DIPA Setjen DPR RI (Biro KSAP dan OI) akibat kebijakan realokasi dan refocusing anggaran secara nasional juga menambah kompleksitas penyelenggaraan kelima sidang internasional tersebut.

7. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kunjungan luar negeri Anggota DPR RI dalam rangka peran diplomasi Parlemen diantisipasi melalui strategi pemilihan negara dengan indeks biaya perjalanan dinas yang lebih rendah dari yang direncanakan di DIPA dan disesuaikan dengan penerimaan dari parlemen yang dituju. Di tahun 2023 direncanakan pengiriman 5 GKSB, 3 Kunjungan Diplomasi BKSAP dan Kunjungan Perorangan Anggota untuk 115 Anggota. Realisasi kunjungan GKSB dapat dilaksanakan sebanyak 16 kali, kunjungan diplomasi BKSAP terlaksana 6 kali sementara untuk kunjungan kerja perorangan Anggota terlaksana untuk 243 anggota DPR RI.
8. Rangkaian kegiatan Presidensi AIPA yang berlangsung mulai Agustus 2022 hingga Agustus 2023 menjadi tantangan tersendiri bagi Biro KSAP dan OI pada aspek keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia.



II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SETJEN DPR RI TAHUN 2020 – 2024

Berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI nomor 18 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekjen DPR RI nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setjen DPR RI tahun 2020 – 2024, untuk mendukung visi DPR RI, maka Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI memiliki **visi, misi dan tujuan** sebagai berikut:



B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Melalui perencanaan organisasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, administrasi serta dukungan teknis lainnya, Biro Kerja Sama antar Parlemen mendukung dan memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan misi diplomasi Parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI.

Misi diplomasi DPR tersebut tidak saja melalui dialog atas berbagai isu-isu internasional dalam kerangka organisasi yang merangkul kerjasama keparlemenan dan kerjasama bilateral tetapi juga melalui pengawasan terhadap berbagai negosiasi internasional dan pelaksanaan berbagai kesepakatan yang sudah diadopsi oleh pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, perjanjian-perjanjian internasional tersebut selalu mendahulukan kepentingan nasional, sejalan dengan norma dan hukum internasional dan menjunjung tinggi penegakan hukum di dalam negeri. Salah satu contoh, BKSAP DPR RI telah mengambil peran strategis dalam mewujudkan ASEAN sebagai *Epicentrum of Growth* sejalan dengan program pemerintah. Isu kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina serta kontribusi terhadap krisis kemanusiaan warga Rohingya di Myanmar, juga masih menjadi fokus diplomasi BKSAP tahun 2023, selain juga isu Pembangunan Berkelanjutan.

Berbagai keterlibatan DPR RI di kancah internasional tersebut didukung oleh Biro KSAP dan OI sebagai bagian dari Kesekretariatan Jenderal yang memberikan dukungan teknis dan keahlian kepada Dewan.

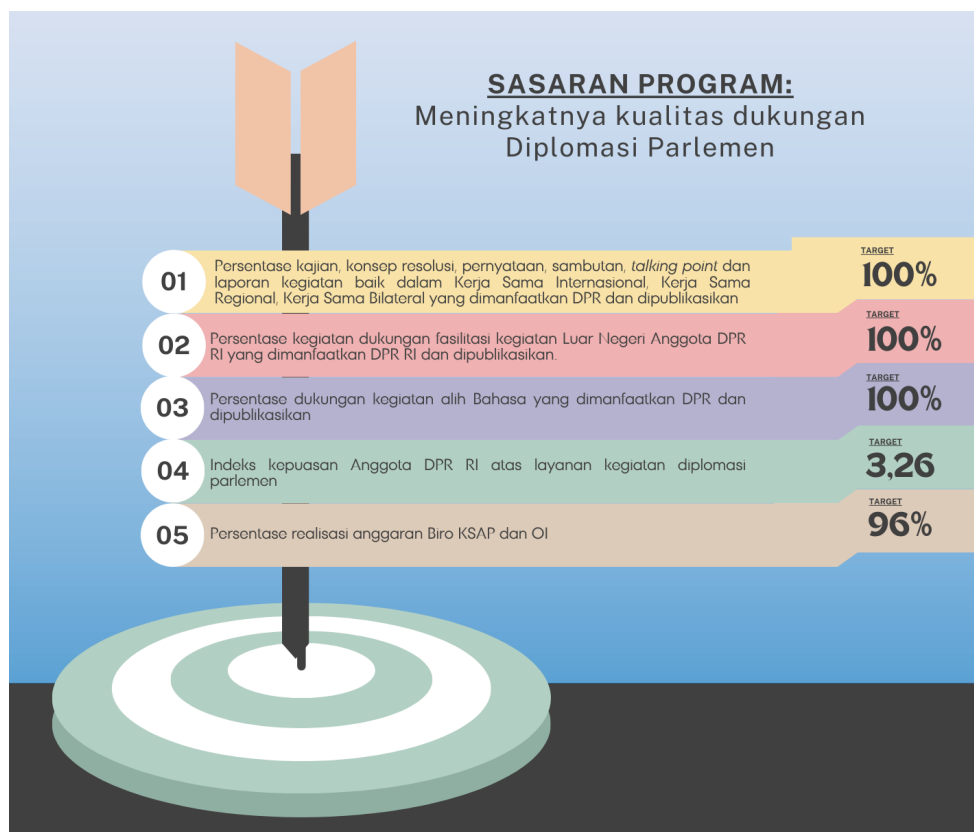
Saat ini Biro KSAP bukan saja memberikan dukungan kepada anggota BKSAP yang berjumlah 53 orang, namun juga kepada Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang berjumlah 575 orang melalui program Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) dan kunjungan diplomasi parlemen perorangan. Selain itu, Biro KSAP juga memberi dukungan kepada anggota parlemen sedunia yang menjadi anggota ASEAN *Parliamentarians against Corruption* (SEAPAC) mengingat saat ini Indonesia menjadi markas besar dari organisasi tersebut

C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro KSAP dan OI telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Perjanjian kinerja berisi sasaran program, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir tahun. Penetapan Kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2023 sebagaimana pada **Gambar 4 berikut**.



Selanjutnya, seiring dalam perjalanan waktu terdapat Perubahan PK Tahun 2023 Biro KSAP, sebagaimana pada **Gambar 5** berikut:



Untuk mendukung pencapaian sasaran program/ kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023, telah dialokasikan dana pada satker Setjen untuk kegiatan Biro KSAP dan OI dengan pagu anggaran sebesar Rp4.969.803.000,00 (Empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh 4 (empat) unit kerja di lingkungan Biro KSAP dan OI.





III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BIRO KSAP DAN OI

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran Program yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja Biro KSAP dan OI Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	1. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan kerja sama internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan kerja sama regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan kerja sama bilateral dan diplomasi perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
		4. Persentase dukungan penerjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %

		5. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen	3,26	3,78	115,95 %
		6. Persentase realisasi anggaran Biro KSAP dan OI	96 %	99,87 %	104,03 %

Tabel diatas adalah Perjanjian Kinerja (PK) Biro KSAP dan OI pada awal tahun 2023, dalam perjalanan waktu terdapat perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, sehingga PK tersebut mengalami perubahan sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	1. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, sambutan, talking point dan laporan kegiatan baik dalam Kerja Sama hternasional, Kerja Sama Regional, Kerja Sama Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan.	100%	100%	100%
		2. Persentase kegiatan dukungan fasilitasi kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan.	100%	100%	100%
		3. Persentase dukungan kegiatan alih Bahasa yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan.	100%	100%	100%
		4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen.	3,26	3,78	115,95%
		5. Persentase realisasi anggaranBiro KSAP dan OI.	96%	99,87%	104,03%

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Evaluasi capaian kinerja program dan indikator kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja I:

Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, sambutan, *talking point* dan laporan kegiatan baik dalam Kerja Sama Internasional, Kerja Sama Regional, Kerja Sama Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan.

Pada akhir tahun 2023, Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan: Kerja Sama Internasional (KSI), Kerja Sama Regional, dan Kerja Sama Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan, mencapai target sebesar 100%. Pencapaian ini sama dengan pencapaian di tahun 2022.

NO	INDIKATOR	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
2.	Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
3.	Presentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
4.	Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, sambutan, talking point dan laporan kegiatan baik dalam Kerja Sama Internasional, Kerja Sama Regional, Kerja Sama Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100%

Kajian, konsep resolusi, pernyataan dan laporan kegiatan yang dimaksudkan di sini adalah berbagai dokumen persiapan ketika DPR RI mengirimkan delegasi untuk menghadiri sidang-sidang Internasional, Regional, maupun pengiriman delegasi bilateral.



Biro KSAP dan OI sebagai *supporting system* menyiapkan berbagai kajian, konsep resolusi, dan juga laporan kegiatan bagi Anggota DPR RI yang menghadiri sidang-sidang tersebut. Laporan kegiatan telah dipublikasikan di website ksap.dpr.go.id, dan berita tentang kegiatan juga dipublikasikan di media sosial BKSAP DPR RI.

Selain pengiriman Delegasi, Biro KSAP dan OI juga bertanggung jawab dalam mempersiapkan penyelenggaraan sidang internasional maupun regional yang diselenggarakan di Indonesia yaitu SEAPAC Conference and General Assembly di Jakarta dan Bogor serta penyelenggaraan The 9th MIKTA Speakers' Consultation di Jakarta, AIPA Leaders' Interface Meeting di Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur (NTT), The 6th Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) di Bogor- Jawa Barat, Women of AIPA (WAIPA) Coordinating Meeting (virtual) di Padang - Sumatera Barat, dan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta.

Biro KSAP dan OI juga memberikan dukungan untuk kegiatan Dewan lainnya seperti mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kunjungan dalam negeri dalam rangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), BKSAP day serta beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara Hybrid/ Virtual.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup Kerja Sama Organisasi Internasional (KSI) antara lain terdiri atas:

1. 20 kegiatan delegasi menghadiri sidang internasional;
2. 2 Sidang sebagai tuan rumah;
3. 10 Rapat kegiatan rapat dan sidang internasional secara virtual;
4. 3 kegiatan kunjungan daerah (BKSAP day, Panja, Workshop dll);
5. 1 Rapat persiapan penyelenggaraan sidang.

Sementara untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup Kerja Sama Regional antara lain terdiri atas:

1. 13 kegiatan rapat dan sidang regional;
2. 1 kegiatan rapat dan sidang regional secara virtual;
3. 17 kegiatan kunjungan daerah (BKSAP day, Panja, dll)

Untuk mendukung kegiatan bilateral, Biro KSAP dan OI juga menyiapkan dukungan bahan-bahan seperti sambutan, *talking points* maupun laporan-laporan kegiatan. Laporan pertemuan *Courtesy Call* maupun kegiatan bilateral lain maupun laporan kunjungan diplomasi perorangan juga telah dipublikasikan di website ksap.dpr.go.id, dan berita tentang kegiatan juga dipublikasikan di media sosial BKSAP DPR RI.

Selanjutnya, untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup Kerja Sama Bilateral antara lain terdiri atas:

1. 6 kegiatan kunjungan diplomasi BKSAP;
2. 16 kegiatan kunjungan GKSB;
3. 243 kegiatan kunjungan diplomasi perorangan;
4. 7 kegiatan kunjungan BKSAP Day;
5. 29 kegiatan courtesy call;
6. 13 kegiatan penerimaan tamu parlemen.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALIASASI 2023	TARGET AKHIR TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN (REALISASI 2023/ TARGET 2024)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, sambutan, talking point dan laporan kegiatan baik dalam Kerja Sama Internasional, Kerja Sama Regional, Kerja Sama Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan.	100%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Tahun 2024 sebesar 100% maka realisasi untuk Tahun 2023 telah memenuhi target dengan tingkat kemajuan realisasi sebesar 100%.

Keberhasilan capaian tersebut dapat diperoleh berkat adanya penambahan anggaran serta peran dan dukungan SDM di lingkungan Biro KSAP dan OI dalam hal memberikan dukungan kepada para Anggota DPR RI berupa komunikasi intensif dengan panitia sidang dimana DPR RI diundang maupun koordinasi dengan KBRI negara tujuan pada pengiriman delegasi GKSB maupun delegasi Diplomasi BKSAP serta komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak sehingga berbagai kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan berbagai kajian yang disiapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Anggota DPR RI. Hal ini tentu saja diperkuat dengan komitmen dari Pimpinan dan kerja sama tim yang baik.

Indikator Kinerja 2:

Persentase kegiatan dukungan fasilitasi kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan.



NO	INDIKATOR	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase kegiatan dukungan fasilitasi kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Indikator ini adalah indikator baru sesuai dengan perubahan dalam PK 2023 mengikuti perubahan struktur baru.

Sepanjang Tahun 2023, Biro KSAP dan OI telah melakukan dukungan fasilitasi kegiatan Luar Negeri kepada 243 Anggota. Kegiatan berupa kunjungan diplomasi perorangan ke beberapa negara sahabat untuk menjalankan diplomasi parlemen.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALIASASI 2023	TARGET AKHIR TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN (REALISASI 2023/ TARGET 2024)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	Persentase kegiatan dukungan fasilitasi kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan.	100%	100%	100%

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Tahun 2024 sebesar 100% maka realisasi untuk Tahun 2023 telah memenuhi target dengan tingkat kemajuan realisasi sebesar 100%.

Keberhasilan capaian tersebut dapat terwujud berkat peran dan dukungan SDM di lingkungan Biro KSAP dan OI dalam hal memberikan fasilitasi kepada para Anggota DPR RI berupa komunikasi intensif dengan KBRI negara tujuan serta berbagai pihak sehingga berbagai kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini tentu saja diperkuat dengan komitmen dari Pimpinan dan kerja sama tim yang baik.

Indikator Kinerja 3:

Pada akhir tahun 2023, presentase dukungan kegiatan alih bahasa DPR dan dipublikasikan, mencapai 100 %. Pencapaian ini sama dengan pencapaian di tahun 2022.

NO	INDIKATOR	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Presentase Dukungan penterjemahan yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Presentase Dukungan kegiatan alih Bahasa dan dipublikasikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Indikator ini adalah indikator baru sesuai dengan perubahan istilah dalam PK 2023.

Biro KSAP dan OI memberikan layanan alih Bahasa tidak hanya kepada Anggota BKSAP, tetapi juga kepada Pimpinan DPR, Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu Biro KSAP dan OI juga melaksanakan penterjemahan sebagian pemberitaan di website DPR RI ke dalam bahasa Inggris.

Kegiatan penterjemahan yang dilaksanakan Biro KSAP dan OI antara lain terdiri atas:

1. 1.136 Tulisan;
2. 15 *Simultaneous Interpreting System (SIS)*
3. 86 konsektif

Selain kegiatan tersebut, Biro KSAP dan OI juga mendukung upaya BKSAP untuk pembentukan Asosiasi Parlemen Bahasa Indonesia - Melayu. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yaitu kunjungan Delegasi BKSAP DPR RI ke Parlemen Malaysia untuk mendiskusikan rencana tersebut dan telah mendapatkan dukungan.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALIASASI 2023	TARGET AKHIR TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN (REALISASI 2023/ TARGET 2024)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	Persentase dukungan kegiatan alih Bahasa yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan.	100%	100%	100%

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Tahun 2024 sebesar 100% maka realisasi untuk Tahun 2023 telah memenuhi target dengan tingkat kemajuan realisasi sebesar 100%.

Tentunya keberhasilan capaian ini dapat terwujud dengan adanya anggaran yang memadai, dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten serta merupakan wujud komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi dan kerjasama tim yang baik.

Indikator Kinerja 4:

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen

Capaian Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen tahun 2023 adalah sebesar 115,95%, karena dari target nilai 3,26 diperoleh hasil nilai survey sebesar 3,78 sehingga realisasi capaian target Indeks kepuasan ini telah melebihi target.

Hasil penghitungan indeks kepuasan ini diperoleh dari hasil survey yang diberikan kepada para Anggota DPR RI yang telah menerima layanan kegiatan diplomasi parlemen.

Dalam tabel berikut menggambarkan persandingan target dan capaian indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen tahun 2021 s.d 2023.

NO	INDIKATOR	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,22	3,22	3,40	3,24	3,26	3,78

Capaian realisasi target sebesar 115,95 % di tahun 2023 merupakan indikasi bahwa Biro KSAP dan OI telah melaksanakan kinerja dengan baik terutama dalam memberikan layanan kegiatan diplomasi parlemen kepada Anggota DPR RI. Selain itu perlu dilakukan penyelarasan antara bentuk layanan yang diberikan Biro KSAP dan OI dengan harapan dan ekspektasi Anggota DPR RI sebagai penerima layanan serta variabel-variabel yang diperhitungkan dalam pelaksanaan survei kepuasan.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALIASASI 2023	TARGET AKHIR TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN (REALISASI 2023/ TARGET 2024)
-----	------------------	-------------------	-----------------	-------------------------	--

1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatandiplomasi parlemen.	3,78	3,28	115,24
----	---	---	------	------	--------

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Tahun 2024 sebesar 3,28 maka realisasi untuk Tahun 2023 telah melebihi target sebesar 115,24%.

Keberhasilan capaian untuk indikator ini bergantung dari persepsi dan penilaian para anggota dewan yang telah disurvei, tentunya hal ini tak terlepas dari kinerja dari Biro KSAP dan OI yang baik sehingga mendapatkan penilaian yang baik dari anggota. Sementara itu, untuk target 2024 masih dalam angka 3,28 diharapkan realisasinya nanti akan melebihi target sebagaimana tahun ini telah melampau target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 5:

Persentase realisasi anggaran Biro KSAP dan OI

Capaian Indikator persentase realisasi anggaran Biro KSAP dan OI mencapai 104,03 %, dimana dari target 96% berhasil terealisasi hingga 99,87 % dari total anggaran. Secara lebih rinci capaian anggaran ini akan dijelaskan dalam bagian realisasi anggaran.

NO	INDIKATOR	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	persentase realisasi anggaran Biro KSAP dan OI	92,50%	95 %	95%	99,56%	96 %	99,87 %

Jika dilihat dari target tahun 2022 target sebesar 95% dengan realisasi sebesar 99,56%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan yakni target 96% dengan capaian realisasi sebesar 99,87%.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALIASASI 2023	TARGET AKHIR TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN (REALISASI 2023/ TARGET 2024)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	Persentase realisasi anggaran Biro KSAP dan OI.	99,87%	96%	104,03%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 96% maka target tahun 2023 telah melampaui sebesar 99,87% yakni sebesar 3,87%.

Sementara itu, untuk target 2024 sebesar 96% diharapkan realisasinya nanti akan melebihi target, sebagaimana tahun 2023 telah melampaui target yang telah ditetapkan.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung fungsi Dewan, Biro KSAP dan OI ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023. Dalam DIPA tersebut, Biro KSAP dan OI mengelola 2 (dua) Satuan Kerja (Satker) Anggaran, yaitu Satker Setjen dan Satker Dewan. Dengan DIPA tersebut Biro KSAP dan OI melaksanakan tugas dan fungsi melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja.

1. Kinerja Anggaran Satker Setjen

Biro KSAP dan OI mengelola anggaran Satker Setjen dengan Pagu sebesar Rp4.969.803.000,00 dimana telah direalisasikan sebesar Rp4.963.444.515,00 atau 99,87 %. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk:

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Biro KSAP dan OI;
- b. Fasilitasi Kerja Sama Organisasi Internasional, Regional, Bilateral dan Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa; dan
- c. Pelaksanaan Pengiriman Delegasi Setjen DPR RI ke Sidang IPU untuk menghadiri pertemuan *Association of Secretaries General of Parliaments*.

NO	KEGIATAN	PAGU 2023	REALISASI	% REALISASI
1	Anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen	4.207.648.000	4.206.540.015	99,97
2	Bagian Set. KSO Internasional	77.728.000	77.728.000	100
3	Bagian Set. KSO Regional	277.727.000	272.476.500	98,11
4	Bagian Set. KSB	190.425.000	190.425.000	100
5	Bagian FKLNA dan Alih Bahasa	216.275.000	216.275.000	100
Jumlah		4.969.803.000	4.963.444.515	99,87

Perbandingan realisasi anggaran Satker Setjen dalam kurun waktu tahun 2020 sd. 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

TAHUN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
2020	1.614.438.000	1.596.080.250	98,86
2021	4.418.351.000	4.287.822.120	97,05
2022	4.648.131.000	4.627.752.365	99,56
2023	4.969.803.000	4.963.444.515	99,87

2. Kinerja Anggaran Satker Dewan

Dari total Pagu anggaran tahun 2023 untuk Satker Dewan sebesar Rp207.707.069.000,00 dimana telah direalisasikan sebesar Rp203.653.206.706,00 atau 98,05%. Anggaran Satker Dewan digunakan untuk penyelenggaraan konferensi dalam negeri, pengembangan hubungan kerja sama luar negeri dan pelaksanaan peran diplomasi Anggota DPR RI.

NO	KEGIATAN	PAGU 2023	REALISASI	% REALISASI
1	Kerja Sama Internasional	29.305.048.000	28.631.378.809	97,70
2	Kerja Sama Regional	66.080.007.000	64.055.948.380	96,94
3	Kerja Sama Bilateral	30.200.068.000	30.192.088.252	99,97
4	Alih Bahasa	82.121.946.000	80.773.791.265	98,36
Jumlah		207.707.069.000	203.653.206.706	98,05

Perbandingan realisasi anggaran Satker Dewan dalam kurun waktu tahun 2020 s.d. 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

TAHUN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
2020	38.069.231.000	21.189.912.620	55,66
2021	71.158.094.000	53.101.686.414	74,62
2022	106.018.387.000	105.387.627.152	99,41
2023	207.707.069.000	203.653.206.706	98,05





IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI serta amanat reformasi birokrasi khususnya area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Biro KSAP dan OI telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas rencana kerja dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Biro KSAP dan OI terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja Biro KSAP dan OI Tahun 2023 menjabarkan capaian atas Indikator Kinerja yang mencerminkan capaian kinerja sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai oleh Biro KSAP dan OI. Secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan di Biro KSAP dan OI telah dilaksanakan dengan optimal dimana semua kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target Biro KSAP dan OI, serta pencapaian tujuan Setjen DPR RI.

B. REKOMENDASI

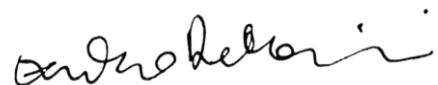
Secara umum sasaran program/kegiatan Biro KSAP dan OI sudah tercapai dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk selanjutnya menjadi rekomendasi bagi unit-unit terkait untuk mendukung peningkatan kinerja Biro KSAP dan OI di masa mendatang, antara lain:

1. Dalam survey untuk meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen, perlu dilaksanakan penyelarasan antara bentuk layanan yang diberikan dengan harapan dan ekspektasi Anggota DPR RI sebagai penerima layanan. Penyelarasan ini juga perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam pelaksanaan survei kepuasan oleh Setjen DPR RI. Selain itu, dalam

- menetapkan target kinerja hendaknya mengedepankan metode **S.M.A.R.T.** (*Spesific, Measureable, Attainable, relevant dan Time-Bond*) khususnya dalam penetapan target yang realistis dan dapat dicapai.
2. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran dengan lebih optimal dan menetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan sebagai *exit strategy* dalam menghadapi risiko pelaksanaan refocussing/ realokasi anggaran di Setjen DPR RI/ secara nasional di masa yang akan datang. Apabila akan ada penambahan anggaran, lebih baik diperoleh lebih awal agar dapat dipergunakan secara maksimal.
 3. Terkait Zona Integritas dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih, Biro KSAP dan OI terus berinovasi dalam memberikan layanan kepada *stakeholder* dan terus melakukan berbagai perbaikan dalam rangka mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), akan tetapi perlu diingat bahwa untuk meraih predikat WBBM diperlukan nilai SAKIP Institusi dengan Nilai A, untuk itu diperlukan kerja sama dari semua pihak.
 4. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, yang memiliki penguasaan substansi tentang isu-isu hubungan internasional baik bilateral, regional maupun internasional, serta disiplin ilmu lainnya melalui diklat/sekolah/seminar/kursus, termasuk peningkatan kompetensi para pejabat fungsional penerjemah DPR RI.
 5. Perlunya pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR RI dan masyarakat, yaitu dengan *updating* database BKSAP, inovasi aplikasi berbagai sistem kerja untuk kerja yang efektif dan efisien, dan *update* pemuatan informasi kegiatan BKSAP terbaru melalui website dan sosial media DPR RI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Jakarta, 19 Januari 2024

Kepala Biro KSAP dan OI



Endah T.D. Retnoastuti



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	1. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
		2. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
		3. Persentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
		4. Presentase Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
		5. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,26
		6. Persentase realisasi anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen	95%

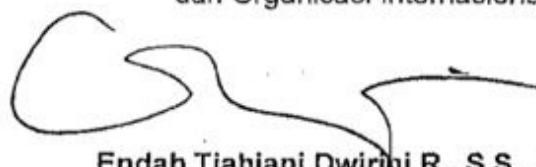
Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp4.969.803.000,-

Pt. Deputi Bidang Persidangan,



Suprihartini, S. P., M.Si
NIP. 19710106 199003 2 001

Jakarta, 14 Desember 2022
Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen
dan Organisasi Internasional,



Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
NIP. 196804021993022001





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
Jabatan : Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suprihartini, S.IP., M.Si.
Jabatan : Deputy Bidang Persidangan

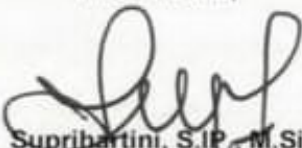
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Juli 2023
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Suprihartini, S.IP., M.Si
NIP. 19710106 199003 2 001

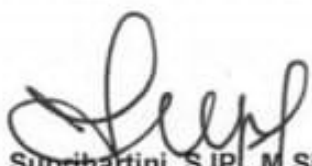

Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
NIP. 196804021993022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Diploması Parlemen	1. Persentase Kajian, Konsep Resolusi, Pernyataan, Sambutan, <i>Talking Points</i> dan Laporan Kegiatan Baik Dalam Kerjasama Internasional, Regional Maupun Bilateral yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%
		2. Presentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%
		3. Presentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diploması Parlemen	3,26
		5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	96%

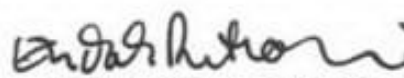
Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp4.969.803.000.00

Deputi Bidang Persidangan,



Suprihartini, S.IP., M.Si
NIP. 19710106 199003 2 001

Jakarta, 3 Juli 2023
Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen dan
Organisasi Internasional,



Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
NIP. 19680402 199302 2 001





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn



BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN
ORGANISASI INTERNASIONAL (KSAP DAN OI)
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr